

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN ALOKASI
ANGGARAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ)
DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2014**

Oleh :

Oky Aditya Pranata

Email : Ocky_zma@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru-Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

DMIJ Program is a program of the Government of Indragiri Hilir which is funded from the budget Indragiri Hilir. Through the Program Desa Maju Jaya Inhil Kembang Mekar Sari village self-help group with a population of 2681 inhabitants comprising several ethnic groups include Malays, Bugis, Banjar, Java and tiong hua.

This research problem formulation What factors affect the Budget Allocation Management Program (DMIJ) in Kembang Mekar Sari subdistrict Keritang Inhil District. The purpose of this study to determine Management Budget Allocation Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) in Kembang Mekar Sari subdistrict Keritang Indragiri Hilir 2014 and to determine the factors that affect the Management Budget Allocation Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Village Kembang Mekar Sari subdistrict Keritang Indragiri Hilir 2014. this research was conducted in Kembang Mekar Sari subdistrict Keritang. The method used is a qualitative research, data collection techniques are interviews, observation and documentation.

Based on the findings that the process of planning, budgeting, disbursement mechanisms have been run in accordance with the PTO DMIJ. While in the process of using Budget Allocation Program DMIJ already well underway, although still not optimal. The functional supervision of supervision conducted by the District Government and the District Government Inhil Keritang the form of reporting, should be done every month (Periodic Report). However, in practice only done twice. The fact has not happened yet direct supervision by the community in the management of Program Budget Allocation DMIJ. Actual administrative accountability has not been carried out correctly, which is held only twice, in the reporting process phase I and phase II. Public participation was one of the factors that support the management of Program Budget Allocation DMIJ. Culture of mutual aid society is the potential of the village in the management of Program Budget Allocation DMIJ in community empowerment. Low Human Resources by the village and the villagers is the main bottleneck management DMIJ Program Allocation Budget.

Keywords : Factors Affecting Program DMIJ

PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintahan desa dituntut melakukan perubahan yang “radikal”, apakah dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintahan desa benar-benar makin mengarah pada praktek *good governance*, bukannya *bad governance*.

Program DMIJ merupakan program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari alokasi dana desa (ADD), Bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta Bantuan

keuangan kepada desa. Dalam pengelolaan keuangan DMIJ dari tingkat kabupaten sampai ke desa yang ditransfer ke rekening kas desa dan dimasukkan ke dalam APBDesa sebagai pendapatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2008 pasal 2 tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyebutkan : (1) kepala desa sebagai pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa, (2) sekretaris desa adalah pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang akan bertindak mencairkan dana desa bersama kepala desa dari rekening PTPKD dan mempertanggung jawabkan keuangan desa bersama bendahara, (3) bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya desa dikelompokkan menjadi 4 kategori atau yang disebut tipologi desa yaitu desa swakarya, desa swadaya, desa swasembada dan desa maju. Pengelompokkan ini mengacu kepada kepadatan penduduk, keadaan alam, letak desa dan kemajuan desa. Mekanisme program DMIJ secara umum mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Program DMIJ diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Operasional.

Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya Desa Kembang Mekar Sari tergolong dalam kelompok desa swadaya dengan jumlah penduduk 2681 jiwa terdiri beberapa etnis antara lain melayu, bugis, banjar, jawa dan tiong hua. Desa Kembang Mekar Sari salah satu Desa yang ada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Desa ini hasil pemekaran dari desa induk yaitu Desa Kotabaru Seberida pada tahun 1978. Awal mulanya Desa Kembang Mekar Sari berinduk ke Desa Kotabaru Seberida, namun karena luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk di Kotabaru Seberida, maka dimekarkan menjadi tiga desa yaitu Desa Kembang Mekar Sari, Desa Kotabaru Seberida dan Desa Pasar Kembang. Luas wilayah desa Kembang Mekar Sari adalah 36.65 (Km²). Desa Kembang Mekar Sari terdapat 5 dusun dan 10 parit.

Desa Kembang Mekar Sari mendapat Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) pada tahun 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-. Berdasarkan Peraturan Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Belanja Dan Pendapatan Desa Kembang Mekar Sari pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan : (1) “Hasil musyawarah Desa sebagaimana pasal 4 ayat 1, telah disepakati APBDesa Kembang Mekar Sari untuk Anggaran tidak langsung sebesar Rp. 167.800.000,- dan Biaya langsung sebesar Rp. 332.200.000,-”.

Dari rincian penggunaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tersebut perlu adanya pengelolaan yang baik dari Pemerintah Desa agar dalam pelaksanaannya dapat di sesuaikan dengan tujuan dan sasaran APBDes.

Pengelola APBDes di Desa Kembang Mekar Sari adalah Kepala Desa, Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan bendahara Desa diharapkan mengerti dan memahami pengelolaan APBDes.

Dalam pengamatan penulis pada proses pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dan budaya gotong royong masyarakat merupakan potensi desa dalam proses pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemerintah desa dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan perangkat desa dan masyarakatnya yang masih lemah. Hal tersebut sesuai dengan data statistik sektoral kecamatan keritang bahwa perangkat desa Kembang Mekar Sari adalah lulusan SMA dan mayoritas masyarakat Desa Kembang Mekar Sari adalah lulusan SD & SMP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan desa Kembang Mekar Sari masih rendah. Hal ini akan berdampak pada proses pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti ini menjadi sebuah karya ilmiah, dengan fokus mengenai faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Tahun 2014, dengan judul : **“Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014”**.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Manajemen

Manajemen dibutuhkan oleh semua orang, karena tanpa manajemen yang baik, segala usaha yang dilakukan organisasi kurang berhasil. Menurut **Hasibuan, (2005)** manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Teori Pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi **Nugroho dan Rochmin Dahuri, (2004)**).

3. Administrasi Pembangunan

Menurut **Siagian, (2003 : 4)** administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

4. Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPDes). Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- 1) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- 2) Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas;
 - Sekretaris desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
 - Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

5. Keuangan Desa

Menurut **Hanif Nurcholis, (2011: 81)** Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut

6. APBDesa

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

7. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan APBDesa

Faktor yang mempengaruhi yang dimaksud disini adalah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pengelolaan APBDesa. Mempengaruhi menurut **Winarno, (2008:149)** adalah suatu pemahaman baru tentang bagaimana suatu sistem berhasil atau gagal dalam menerjemahkan tujuan-tujuan kebijakan secara umum kedalam pelayanan pelaksanaan pembagumnan untuk kesejahteraan publik yang nyata dan bermakna bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pengkajian analisa dalam terhadap permasalahan yang diteliti berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, maka teknik yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif dimana data yang telah berhasil dikumpulkan dari informan dan sumber-sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kemudian diolah dan dianalisa berdasarkan teori yang digunakan untuk diambil kesimpulan secara spesifik dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil

Jaya di Desa Kembang Mekar Sari a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan di Desa Kembang Mekar Sari, bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dalam pelaksanaan Program DMIJ cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan program DMIJ yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat cukup tinggi.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil mengenai tingkat kehadiran dan jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan Program DMIJ, diperoleh informasi bahwa:

“Masyarakat sangat antusias menghadiri musyawarah Desa dalam perencanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), bukan hanya laki-laki saja yang hadir pada musyawarah Desa ini akan tetapi ada sebagian wanita juga turut hadir dan ikut memberikan usulan-usulan dalam perencanaan Pembangunan di Desa Kembang Mekarsari. Masyarakat sangat senang dengan adanya Program DMIJ tersebut”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, budaya gotong royong masyarakat juga merupakan salah satu Faktor pendukung dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ di Desa Kembang Mekar Sari, budaya masyarakat yang tinggi dapat mendukung Pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan Teori Pemberdayaan oleh

Wahjudin Sumpeno, (2011 : 19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua LPM Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil mengenai tingkat kehadiran dan jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan Program DMIJ, diperoleh informasi bahwa:

“Budaya gotong royong masyarakat Desa Kembang Mekar Sari Sangat Tinggi. Saya melihat dari antusias masyarakat yang bukan termasuk Kelompok Kerja (POKJA) pembangunan jembatan dan pembuatan pagar kantor desa turut membantu Kelompok Kerja (POKJA) dalam pembangunan jembatan dan pembuatan pagar kantor desa. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat senang dengan program DMIJ yang sangat membantu dalam pembangunan infrastruktur di Desa ini”.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Program DMIJ pada Desa Kembang Mekar Sari yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Desa Kembang Mekar Sari yaitu lulusan SD dan SMP. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan Alokasi Program DMIJ pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan program DMIJ pada Desa Kembang Mekar Sari menerapkan sistem musyawarah desa.

Hasil penelitian menunjukkan dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan

dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, jembatan, irigrasi, pembangunan sekolah, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan Alokasi Anggaran DMIJ tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari sendiri dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan yang rendah, sesuai dengan Data Statistik Sektor Kecamatan Keritang Tahun 2014 yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa adalah lulusan SMU. Hal tersebut akan berdampak pada pengelolaan Alokasi Program DMIJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Kembang Mekar Sari masih ada yang tidak mengetahui perencanaan penggunaan Alokasi Anggaran Program DMIJ. Dikarenakan kurang pemahannya masyarakat akan adanya Program DMIJ dan belum adanya sosialisasi dan transparansi perencanaan penggunaan Alokasi Anggaran Program DMIJ dari pemerintah Desa Kembang Mekar Sari.

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Kembang Mekar Sari mengenai perencanaan penggunaan Alokasi Anggaran DMIJ, diperoleh informasi :

“Alokasi Anggaran Program DMIJ di Desa Kembang Mekar Sari sebesar Rp. 500.000.000,- dan dana itu digunakan untuk pembanguaan jembatan di Parit Sayag dan pembuatan Pagar Kantor Desa di Parit Usaha Jadi. Sejauh ini pemerintah Desa belum melakukan sosialisasi tentang perencanaan penggunaan Alokasi Program DMIJ kepada masyarakat umum Desa Kembang

Mekar Sari”.

2. Pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Ihil Jaya (DMIJ) di Desa Kembang Mekar Sari

a. Perencanaan Program DMIJ

Perencanaan Alokasi Anggaran Program DMIJ dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada Desa Kembang Mekar Sari, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Alokasi Anggaran Program DMIJ serta musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Menurut hasil wawancara penulis dengan sekretaris Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa :

“Dari hasil rapat RKP-Desa Tahun 2014 ada dua kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan Non-Fisik dan Fisik. Kegiatan Non-Fisik meliputi Magrib Mengaji, PAUD, Kegiatan Posyandu, PKK, Dokumen Perencanaan Desa, Penigkatan Kapasitas, Paket Informasi, Pembelian Mobiler dan Alat Penunjang Pelayanan. Sedangkan kegiatan Fisik meliputi Pembangunan Jembatan di Parit Sayang dan Pembuatan Pagar Kantor Desa”.

Perencanaan Alokasi Anggaran Program DMIJ pada Desa Kembang Mekar Sari dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah Desa. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah Desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat.

b. Penganggaran Program DMIJ

Penganggaran DMIJ dilakukan setelah hasil musyawarah desa disetujui oleh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun RKP-Desa selama satu tahun berjalan. Adapun Alokasi Anggaran Program DMIJ di desa Kembang Mekar Sari sejumlah Rp. 500.000.000,-.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rencana Penganggaran sudah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Operasional Program DMIJ. Didalam PTO Program DMIJ dijelaskan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembagunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

c. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Anggaran Program DMIJ

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Anggaran Program DMIJ secara teknis ada dua tahap yang harus dilalui yaitu sebagai berikut :

- 1) Pencairan Dana Tahap I adalah sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen
 - b) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM

- c) Surat permohonan penyaluran dana
- d) Kwitansi pembayaran
- e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
- f) Surat pernyataan penggunaan dana
- g) Peraturan Desa terkait APBDDesa yang dilengkapi dengan lampirannya
- h) Fotocopy KTP kepala desa
- i) Fotocopy rekening desa
- 2) Pencairan Dana Tahap II adalah sebagai berikut :
 - a) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen
 - b) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM
 - c) Surat permohonan penyaluran dana
 - d) Kwitansi pembayaran
 - e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
 - f) Surat pernyataan penggunaan dana
 - g) Laporan realisasi penyerapan dana
 - h) Peraturan Desa terkait APBDDesa yang dilengkapi dengan lampirannya
 - i) Fotocopy KTP kepala desa
 - j) Fotocopy rekening desa / rekening Koran
 - k) Berita acara Musyawarah Desa pertanggungjawaban (MDPJ)
 - l) Surat pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya berserta dokumen pendukung.

Mekanisme pencairan Alokasi Anggaran Program DMIJ di Desa Kembang Mekar Sari sudah sesuai dengan PTO program DMIJ. Yaitu dilakukan dengan dua Tahap yaitu Pencairan Tahap I dan Pencairan Tahap II.

d. Penggunaan Alokasi Anggaran Program DMIJ

Penggunaan Program DMIJ di Desa Kembang Mekar Sari untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sejumlah Rp. 353.200.000,-.

Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat dalam keagamaan dana yang di alokasikan dari Program DMIJ yaitu diadakan Program magrib mengaji untuk anak-anak. Tujuan dari magrib mengaji ini untuk meningkatkan keshalehan anak-anak dan membina pengetahuan anak-anak tentang AL-qur'an maupun tentang agama sejak dini. Alokasi Anggaran Program DMIJ untuk magrib mengaji sejumlah Rp. 16.596.000,-. Pemberdayaan masyarakat di Desa Kembang Mekar Sari dalam keagamaan bisa dikatakan sudah

tepat penggunaannya.

Menurut **Suharto, (2005 : 55)** yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan. Alokasi Anggaran Program DMIJ di Desa Kembang Mekar Sari untuk peningkatan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk pembangunan PAUD sejumlah Rp. 49.950.500,-. Dalam pemanfaatannya sebenarnya sudah sesuai, namun terlalu kecilnya dialokasikan merupakan kelemahan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut sesuai tingkat pendidikan terakhir penduduk Desa Kembang Mekar Sari yang mayoritas lulusan SD dan SMP. Alangkah baiknya apabila Pemerintah Desa meningkatkan anggaran untuk bidang

pendidikan dan menggunakan dana tersebut untuk menunjang kegiatan-kegiatan pendidikan selain sekolah seperti Pendidikan dan Pelatihan kelompok tani.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan dalam penggunaan dana untuk peningkatkan derajat kesehatan di Desa Kembang Mekar Sari yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sejumlah Rp. 6.030.000,-. Biaya tersebut digunakan untuk membiayai insentif sejumlah Rp. 4.200.000,-, pemberian makanan tambahan sejumlah Rp. 400.000,-, pembelian timbangan sejumlah Rp. 1.300.000,- dan biaya pajak Rp. 130.000. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori Pemberdayaan Masyarakat oleh **Suharto, (2005 : 59)** yang menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran dan perawatan anak. Disini dilihat bahwa penggunaan bantuan kepada Posyandu hanya sesuai dengan kebutuhan Posyandu tersebut. Akan tetapi tidak mementingkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kembang Mekar Sari.

Menurut teori Pemberdayaan Masyarakat oleh **Widjaja, (2004:169)** menjelaskan bahwa cara dalam memberdayakan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, pemberian kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Desa Kembang Mekar Sari mengalokasikan Anggaran Program DMIJ untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu dengan peningkatan peran wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.

Dalam mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari PKK, yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dan kemandirian. Desa Kembang Mekar Sari Alokasi Anggaran Program DMIJ untuk kegiatan PKK sejumlah Rp. 8.630.000,-. Fenomena dilapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan gender dalam bidang politik dimana tidak ada keterlibatan perempuan dalam pemerintahan di Desa Kembang Mekar Sari.

Alokasi Anggaran Program DMIJ digunakan untuk membiayai Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu dokumen perencanaan Desa sejumlah Rp. 4.619.500,-, peningkatan kapasitas sejumlah Rp. 5.000.000,-, paket informasi sejumlah Rp. 1.200.000,-, penunjang pembelian mobile dan alat sejumlah Rp. 21.005.000,-. Berdasarkan hasil penelitian Alokasi Anggaran Program DMIJ untuk membiayai belanja penyelenggaraan pemerintah desa sudah tepat guna sesuai dengan kebutuhan.

Alokasi Anggaran Program DMIJ di Desa Kembang Mekar Sari dalam pembangunan infrastruktur Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan jembatan Parit Sayang sejumlah Rp. 151.624.500,- dan pembuatan pagar kantor Desa sejumlah Rp. 67.490.000,-. Penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur di Desa Kembang Mekar Sari telah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pada tahap perencanaan.

Penggunaan Alokasi Anggaran Program DMIJ cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan gotong royong masyarakat maupun dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa.

Namun dampak negatif yang muncul dari keberadaan Program DMIJ seperti timbulnya ketergantungan desa terhadap dana tersebut. Di Desa Kembang Mekar Sari Pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan Alokasi Anggaran Program DMIJ belum optimal.

e. Pengawasan Alokasi Anggaran Program DMIJ

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan Fisik dan Non-Fisik. Pengawasan Alokasi Program DMIJ secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Inhil maupun Kecamatan Keritang yang menyelenggarakan pengawasan.

Berdasarkan fenomena dilapangan pengawasan oleh pemerintah Kabupaten Inhil Maupun camat yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.

Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui Struktur Organisasi dan Bagan Organisasi dengan rentang kendali yang tegas dan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan yang melekat pada Desa Kembang Mekar Sari telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian belum terjadi pengawasan secara langsung oleh

masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ. Hal tersebut terjadi karena kurang pemahannya masyarakat akan adanya Program DMIJ sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi pengguna dana Program DMIJ dari Pemerintah Desa.

f. Pertanggungjawaban Alokasi Anggaran Program DMIJ

Pertanggung jawaban merupakan bentuk konsekuensi atas pengguna dana publik yang dipercayakan kepada Pemerintah Desa. Fenomena dilapangan bentuk pertanggung jawaban pada Desa Kembang Mekar Sari cenderung bersifat administratif. Pertanggung jawaban administratif merupakan pertanggung jawaban Pemerintah Desa atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Anggaran Program DMIJ secara administratif berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Pembangunan Desa Kegiatan Fisik dan Non-Fisik Program DMIJ Desa Kembang Mekar Sari Tahun 2014. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Desa bahwa pertanggung jawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan dana. Pelaporan dilakukan setiap bulan (secara berkala) dilaksanakan secara struktural dari PTPKD, Kepala Desa, Camat, Sekretariat dan Bupati. Namun dalam pelaksanaannya pertanggung jawaban Alokasi Anggaran Program DMIJ pada Desa Kembang Mekar Sari hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun yakni pada saat pelaporan tahap I dan Tahap II.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggung jawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan

oleh Pemerintah Desa sebagai pengelola Alokasi Anggaran Program DMIJ dalam bentuk informasi penggunaan Alokasi Anggaran Program DMIJ.

KESIMPULAN

Perencanaan Alokasi Anggaran Program DMIJ dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembung desa. Pada Desa Kembang Mekar Sari, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Alokasi Anggaran Program DMIJ serta musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Rencana Penganggaran pada Desa Kembang Mekar Sari sudah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Operasional Program DMIJ. Didalam PTO Program DMIJ dijelaskan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Mekanisme pencairan Alokasi Anggaran Program DMIJ di Desa Kembang Mekar Sari sudah sesuai dengan PTO program DMIJ. Yaitu dilakukan dengan dua Tahap yaitu Pencairan Tahap I dan Pencairan Tahap II.

Secara umum penggunaan Alokasi Anggaran Program DMIJ berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan Alokasi Anggaran Program DMIJ masih belum optimal.

Pengawasan dalam Program DMIJ terdiri dari 3 jenis pengawasan. Pertama, pengawasan fungsional yakni pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil maupun Pemerintah Kecamatan Keritang yang berupa pelaporan, seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala). Namun, pada pelaksanaannya hanya dilakukan dua kali. Kedua, pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi Pemerintah Desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat, faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ. Hal tersebut terjadi diakrenakan ketidakpahaman masyarakat akan adanya Program DMIJ.

Pertanggung jawaban Alokasi Anggaran Program DMIJ terdiri dari dua jenis pertanggung jawaban. Pertama, pertanggung jawaban administratif sebenarnya belum dilakukan secara tepat, yakni dilaksanakan hanya dua kali yaitu pada proses pelaporan tahap I dan tahap II. Kedua, pertanggung jawaban secara langsung kepada masyarakat Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh Pemerintah Desa sebagai pengelola Alokasi Anggaran Program DMIJ dalam bentuk informasi penggunaan Alokasi Anggaran Program DMIJ.

Faktor pendukung dalam

pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ khususnya dalam proses perencanaan. Kedua, budaya gotong royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ.

Faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Anggaran Program

DMIJ yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Rendahnya Sumber Daya Manusia Perangkat Desa maupun penduduk desa. Sumber daya manusia yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Desa Kembang Mekar Sari yaitu lulusan SD dan SMP. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan Alokasi Program DMIJ pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban desa menjadi penghambat utama pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ. Selain itu, rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Anggaran Program DMIJ juga merupakan salah satu faktor penghambat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2014. *Data Statistik Sektoral Kecamatan Keritang*. BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2003. *Manajemen Pembangunan Indonesia : Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor

26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya

Siagian, Sondang P, 2003. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Suharto, Edi, 2003. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama

Wahjudin, Sumpeno, 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh : Reinforcement Action And Development.

Widjaja, HAW, 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta : Media Page